

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Hasil dari identifikasi sebaran daerah rawan tanah longsor yang lebih akurat dalam merepresentasikan kondisi di lapangan adalah SNI Permen PU yang terklasifikasi ke dalam tiga kelas, yaitu:

- **Tingkat Kerawanan Tinggi**
Tingkat kerawanan tinggi tersebar di 16 desa dengan luas total 1.089,07 Ha atau 18,53%, dan paling luas berada di Desa Kemitir.
- **Tingkat Kerawanan Sedang**
Tingkat kerawanan sedang tersebar di 16 desa dengan luas total 3.513,64 Ha atau 59,77%, dan paling luas berada di Desa Candigaron.
- **Tingkat Kerawanan Rendah**
Tingkat kerawanan rendah tersebar di 15 desa dengan luas total 1.276,20 Ha atau 21,71%, dan paling luas berada di Desa Kebonagung.

5.2 Kelemahan Penelitian

Penelitian mengenai identifikasi sebaran daerah rawan longsor ini memiliki banyak kelemahan karena keterbatasan penulis. Beberapa kelemahan tersebut antara lain:

1. Kriteria atau variabel yang digunakan di dalam penelitian ini masih sedikit dan belum mewakili sepenuhnya faktor – faktor lain yang mempengaruhi terjadinya tanah longsor.
2. Penentuan bobot kriteria pada metode *matriks pairwise comparison* dalam konteks AHP hanya diperoleh berdasarkan pertimbangan dari persepsi dua ahli geologi, masih perlu tambahan pakar ahli lagi sehingga hasilnya juga akan lebih akurat.
3. Data atau .shp yang digunakan pada kriteria pemicu longsor belum terlalu detail karena sumber data yang digunakan berasal dari data Bappeda Kabupaten Semarang tahun 2015 dengan skala kabupaten yang berdampak pada ketidakseragaman skala peta input.
4. Persebaran titik validasi lapangan masih cenderung mengikuti pola jalan dan cenderung kurang merata di beberapa wilayah karena aksesibilitas yang sulit di lapangan.
5. Tidak melakukan proses wawancara terhadap masyarakat setempat mengenai lokasi dan sejarah terjadinya longsor dalam uji validasi lapangan.

6. Hasil sebaran daerah rawan longsor belum secara detail memetakan tingkat kerawanan pada daerah-daerah dengan kepadatan penduduk yang lebih tinggi maupun wilayah permukiman atau terbangunnya.
7. Keterbatasan dalam metode penelitian serta pemahaman penulis mengenai konsep tanah longsor dalam penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan.

5.3 Saran

Berikut merupakan beberapa saran dalam penelitian identifikasi sebaran daerah rawan longsor di Kecamatan Sumowono:

1. Ketersediaan data riwayat longsor di wilayah penelitian secara rinci diperlukan, sehingga memudahkan bagi peneliti untuk proses analisis lebih lanjut.
2. Pemilihan para pakar ahli untuk menentukan bobot kriteria dalam penelitian ini diharapkan merupakan orang-orang yang memiliki keahlian dan mengerti tentang tanah longsor.
3. Ketelitian penulis sangat diperlukan dalam pengambilan dan pengolahan data, sehingga dapat memberikan hasil akhir yang sesuai harapan.
4. Pemberian skor dan bobot tiap kriteria perlu memerlukan beberapa penyesuaian kembali sehingga dapat dicapai susunan yang lebih tepat.
5. Persebaran titik sampel validasi lapangan diharapkan lebih merata ke semua bagian wilayah penelitian, sehingga diperoleh tingkat kerakuratan yang lebih tepat.

5.4 Rekomendasi

Terdapat beberapa rekomendasi berdasarkan hasil analisis identifikasi sebaran daerah rawan longsor di Kecamatan Sumowono, antara lain:

- a. Keilmuan Perencanaan Wilayah dan Kota

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan pengetahuan kepada pihak akademisi bidang perencanaan wilayah dan kota, khususnya yang berhubungan dengan geomatika dalam menentukan daerah rawan longsor. Dalam mengidentifikasi daerah rawan longsor di suatu wilayah tidak hanya dapat dilakukan berdasarkan ketentuan dari SNI saja, tetapi bisa dilakukan dengan menggunakan berbagai metode lainnya, seperti *matriks pairwise comparison* dalam konteks AHP. Untuk kedepannya, penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan kriteria-kriteria lainnya dalam menentukan daerah rawan longsor. Dengan adanya penelitian lebih lanjut tersebut diharapkan hasil yang didapatkan lebih akurat dalam merepresentasikan kondisi di lapangan.

- b. Pemerintah

- Sebagai pembuat kebijakan, pemerintah berperan penting dalam penanganan bencana alam terutama tanah longsor yang biasa terjadi di daerah perbukitan.
- Mengarahkan, membuat peraturan, dan menentukan penggunaan lahan yang tepat di daerah yang teridentifikasi rawan longsor.
- Adanya upaya non-struktural seperti pemberian sosialisasi atau pemahaman mengenai karakteristik bencana tanah longsor, memberikan pelatihan kepada masyarakat dalam langkah-langkah dalam menghadapi longsor, sehingga masyarakat lebih siap dalam menghadapi bencana longsor.
- Pengoptimalan dan meningkatkan kinerja lembaga-lembaga pemerintah yang bergerak pada bidang kebencanaan, seperti BPBD agar lebih sigap dalam melakukan penanganan khususnya tanah longsor, antara lain tindakan pencegahan, evakuasi masyarakat, maupun dokumentasi tanah longsor yang terjadi di wilayah tersebut.

c. Masyarakat Lokal

- Masyarakat diharapkan lebih berhati-hati lagi dalam menggunakan pemanfaatan lahan, sehingga tidak mengganggu kestabilan lereng.
- Masyarakat diharapkan lebih tanggap terhadap bencana alam di wilayahnya, dapat dilakukan juga dengan membuat suatu komunitas peduli bencana, terutama bencana tanah longsor dan juga lebih proaktif terhadap kebijakan pemerintah terkait mitigasi.
- Perlu adanya pembuatan talud atau dinding penahan tanah pada daerah dengan tingkat kecuraman yang tinggi atau daerah rawan longsor. Masyarakat juga perlu memperhatikan dalam pemotongan lereng untuk meminimalisir terjadinya longsor.